# RENCANA STRATEGIS

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

## 2019 - 2024

KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA KOTA BOGOR

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E)

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2019-2024.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bogor .
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bogor.
7. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. sistematika rencana strategis;
b. pengendalian dan evaluasi; dan
c. perubahan rencana strategis.

## BAB III
## SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

### Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian meliputi:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
   c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
   d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
   e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
   f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
   g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
   h. BAB VIII : Penutup.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

(1) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

(4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

(5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V
## PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

### Pasal 5

(1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.

(2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

## BAB VI
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 6

(1) Sebelum Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

(2) Renja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

## BAB VII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2019

**WALI KOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**ADE SARIP HIDAYAT**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 57 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR : 63 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019
TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2019-2024

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor merupakan salah satu dinas yang menangani urusan wajib dibidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga, sehingga keberadaannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan seirama dengan tuntutan jaman dan kemajuan teknologi.

Dalam rangka menuju dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk aktif memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disegala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas dibidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke wilayah pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan peran TIK dapat menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah kepada publik.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Pemerintah Pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional. Pelayanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-government*) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dinas serta agar dapat mencapai hasil yang optimal perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019-2024. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019-2024 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan mengsinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Diskominfostandi Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Provinsi Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *e-Government* (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 59 Seri E);
32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 13 Seri D);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 23 Seri D).

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan perencanaan strategis 2019-2024 adalah untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahTahun 2019-2024;
2. Memberika pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2019-2024);
3. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan PersandianKota Bogor khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahahan dibidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor.

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BABIV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

### 2.1.1. Tugas dan Fungsi

**1. Kepala Dinas**

Dinasdipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
e. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerjadi lingkup Dinas;
b. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, pengendalian, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Di bawah sekretariat terdapat:

**2a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi umum;
b. Pengelolaan kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana Dinas;
c. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepegawaian meliputi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, rotasi, serta kesejahteraan pegawai struktural dan fungsional dilingkup Dinas;
d. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**2b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dibidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
b. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembinaan satuan pemegang kas serta pelayanan dibidang keuangan;
c. Penyusunan laporan realisasi keuangan dan neraca Dinas;
d. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan.

**2c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dibidang perencanaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja lingkup Dinas;
b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi;
c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
d. Penyusunan laporan kegiatan Dinas.

**3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik**

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi Publik;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Komunikasi dan Informasi Publik;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Di bawah Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdapat:

**3a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbinganteknis Pengelolaan Komunikasi Publik;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik.

**3b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik**

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pengelolaan Informasi Publik;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Informasi Publik;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Informasi Publik.

**3c. Seksi Kemitraan Media Publik**

Seksi Kemitraan Media Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Kemitraan Media Publik mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Kemitraan Media Publik;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Kemitraan Media Publik;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kemitraan Media Publik

**4. Bidang Teknologi Informasi**

Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Teknologi Informasi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Teknologi Informasi;
b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Teknologi Informasi;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Teknologi Informasi;

Di bawah Bidang Teknologi Informasi terdapat:

**4a. Seksi Infrastruktur Jaringan**

Seksi Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Teknologi Informasi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Infrastruktur Jaringan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Infrastruktur Jaringan;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur Jaringan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Infrastruktur Jaringan.

**4b. Seksi Infrastruktur Pusat Data**

Seksi Infrastruktur Pusat Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Teknologi Informasi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Infrastruktur Pusat Data mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur Pusat Data;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Pusat Data;
c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Infrastruktur Pusat Data;

**4c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian**

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Teknologi Informasi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Keamanan Informasi dan Persandian;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Keamanan Informasi dan Persandian;

c. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Keamanan Informasi dan Persandian.

**5. Bidang Layanan *e-Government***

Bidang Layanan *e-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Layanan*e-Government*.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Layanan*e-Government* mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang Layanan *e-Government*;
b. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan dibidang Layanan *e-Government*;
c. Penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang Layanan *e-Government*;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Layanan *e-Government*.

Di bawah Bidang Layanan e-Government terdapat:

**5a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi**

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Layanan *e-Government*.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di lingkup pengembangan aplikasi dan Sistem Integrasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi;
c. Penyiapan bahan penyusunan dan penataan kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi.

**5b. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government***

Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Layanan *e-Government*.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government* mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Ekosistem *e-Government*;

**5c. Seksi Tata Kelola e-Goverment**

Seksi Tata Kelola *e-Goverment* dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Layanan *e-Government*.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Tata Kelola *e-Goverment* mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Kelola *e-Government*;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Tata Kelola *e-Government*;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tata Kelola *e-Government*.

**6. Bidang Statistik Sektoral**

Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Statistik Sektoral;
b. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan dibidang Statistik Sektoral;
c. Penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang Statistik Sektoral;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Statistik Sektoral.

Di bawah Bidang Statistik Sektoral terdapat:

**6a. Seksi Kompilasi Data**

Seksi Kompilasi Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Kompilasi Data mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dilingkup Kompilasi Data;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Kompilasi Data;
c. Penyiapan bahan penyusunan dan penataan kegiatan Kompilasi Data;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kompilasi Data.

**6b. Seksi Pengolahan Data**

Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengolahan Data;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengolahan Data;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengolahan Data.

**6c. Seksi Penyajian Data**

Seksi Penyajian Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Penyajian Data mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penyajian Data;
b. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Penyajian Data;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penyajian Data.

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

a. Kelompok Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
c. Kelompok Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Perekayasa dan TeknisiPenelitian dan Perekayasa memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
e. Kelompok Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok yang dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkup Dinas.
f. Jumlah Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
g. Jenis dan jenjang jabatan fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### *2.1.1.* **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian termasuk ke dalam Dinas Tipe A yang terdiri dari:

a. **Kepala Dinas;**
b. **Sekretariat, membawahkan:**
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
c. **Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan:**
    1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
    2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
    3. Seksi Kemitraan Media Publik;
d. **Bidang Teknologi Informasi, membawahkan:**
    1. Seksi Infrastruktur Jaringan;
    2. Seksi Infrastruktur Pusat Data;
    3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
e. **Bidang Layanan *e-Government*, membawahkan:**
    1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Sistem Integrasi;
    2. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
    3. Seksi Tata Kelola *e-Government*;
f. **Bidang Statistik Sektoral, membawahkan:**
    1. Seksi Kompilasi Data;
    2. Seksi Pengolahan Data;
    3. Seksi Penyajian Data;
g. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
**(Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor)**

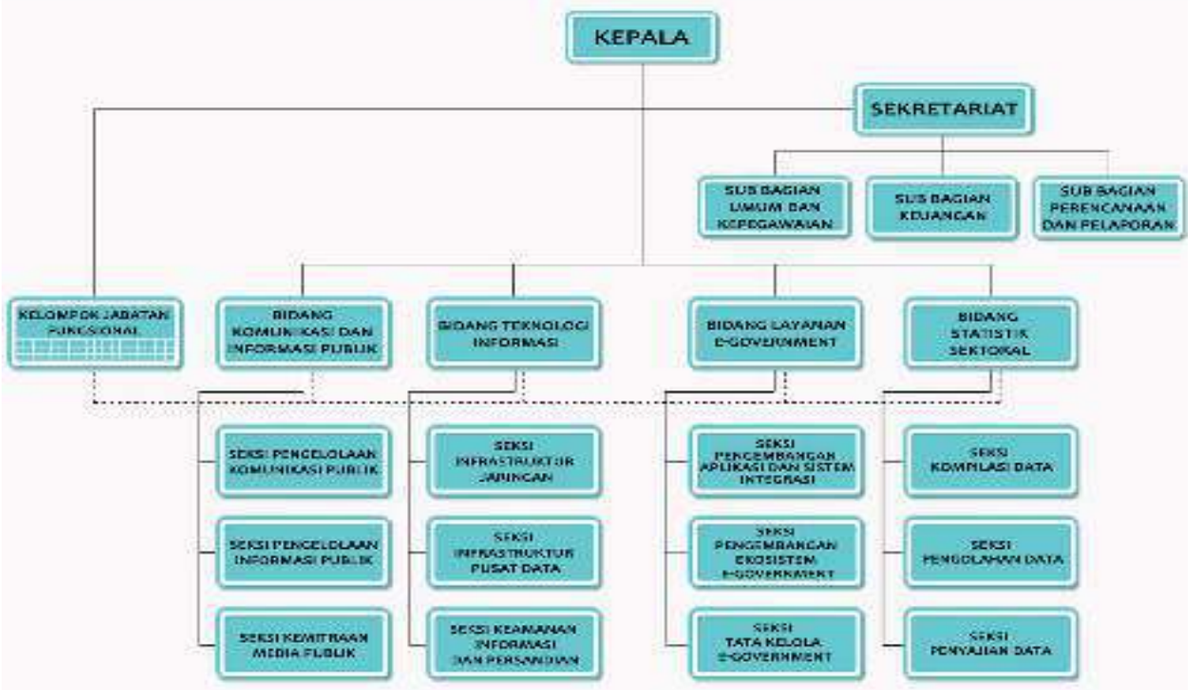


*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Gambar 2.1.***
***Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor***

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

### 2.2.1.Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan Jenis Kelamin:

| Jabatan Pegawai | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|
| | Perempuan | Laki-laki |
| Kepala Dinas | | 1 |
| Sekretaris | 1 | |
| Kepala Bidang | 1 | 3 |
| Kepala Seksi/Sub Bagian | 4 | 10 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | | 5 |
| Pelaksana | 13 | 18 |
| **JUMLAH TOTAL** | **19** | **32** |
| | **51** | |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Tabel 2.2***
***Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin***

b. Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan:

| No | Jabatan Pegawai | Eselon | Golongan I | | | | Golongan II | | | | Golongan III | | | | Golongan IV | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | |
| 1 | Kepala Dinas | IIa | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 2 | Sekretaris | IIIa | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | IIIb | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IVa | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| 5 | Kepala Seksi | IVa | | | | | | | | | | | 3 | 7 | 1 | | | | 11 |
| 6 | Jabatan Fungsional Tertentu | - | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 5 |
| 7 | Pelaksana | - | | | | | | | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | | | | | 26 |
| **Jumlah** | | | | | | | | | **6** | **1** | **9** | **9** | **8** | **11** | **5** | **1** | **1** | | **51** |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Tabel 2.3***
***Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan dan Golongan***

c. Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan:

| Jabatan Pegawai | Pendidikan | | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD | SMP | SMA | D1 | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 | |
| Kepala Dinas | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Sekretaris | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Kepala Bidang | | | | | | 1 | | 3 | | 4 |
| Kepala Seksi/ Sub Bagian | | | | | | | 7 | 7 | | 14 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | | | | | 2 | | 3 | | | 5 |
| Pelaksana | | | 4 | | 6 | | 14 | 2 | | 26 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | **51** |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Tabel 2.4***
***Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan***

d. Tabel 2.5 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor:

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Semester 1 Tahun 2019 ) | | | Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | P3K | NON PNS | PNS | P3K | PNS | P3K |
| 1 | **Kepala** | 1 | | | | | | |
| 2 | **Sekretaris Bidang** | 1 | | | | | | |
| | ***2.1.Kepala Sub Bagian Keuangan*** | 1 | | | | | | |
| | 2.1.1.Bendahara Pengeluaran | 1 | | | | | | |
| | 2.1.2.Verifikator Data Laporan Keuangan | 1 | | | 2 | | | |
| | 2.1.3.Administrasi Keuangan | 1 | | | | | | |
| | 2.1.4.Pengelola Keuangan | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | ***2.2.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan*** | 1 | | | | | | |
| | 2.2.1.Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2.2.2.Pengelola Bahan Perencanaan | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | ***2.3.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*** | 1 | | | | | | |
| | 2.3.1. Analis Kepegawaian | | | | 1 | | | |
| | 2.3.2. Analis SDM Aparatur | | | | 1 | | | |
| | 2.3.3.Pengelola Rumah Tangga | 1 | | 2 | 1 | | | |
| | 2.3.4.Pengelola BMD | 2 | | | 2 | | | |
| | 2.3.5.Pengadmimistrasian Umum | 1 | | | 2 | | | |
| 3 | **Kepala Bidang Statistik Sektoral** | 1 | | | | | | |
| | ***3.1. Kepala Seksi Kompilasi Data*** | 1 | | | | | | |
| | 3.1.1, Analis Statistik | 1 | | | | | | |
| | 3.1.2 Analis Sistem Informasi | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 3.1.3.Pengolah Data | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | 3.1.4.Operator BGR | | | 4 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ***3.2.Kepala Seksi Pengolahan Data*** | 1 | | | | | | |
| | 3.2.1.Analisis Statistik | 1 | | | | | | |
| | 3.2.2.Analis Sistem Informasi | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 3.2.3.Pengolah Data | | | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | | |

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Semester 1 Tahun 2019 ) | | | Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | P3K | NON PNS | PNS | P3K | PNS | P3K |
| | ***3.3.Kepala Seksi Penyajian Data*** | 1 | | | | | | |
| | 3.3.1.Analisis Statistik | | | | 1 | | 1 | |
| | 3.3.2.Analisis Sistem Informasi | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 3.3.3.Pengolah Data | | | | | | | |
| | 3.3.4.Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi | | | | | | | |
| | 3.3.5.Tekhnisi CCTV | | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | **Kepala Bidang Layanan *e-Government*** | 1 | | | | | | |
| | ***4.1.Kasi Pengembangan Aplikasi dan SistemIntegrasi*** | 1 | | | | | | |
| | 4.1.1.Pengelola Situs/Web | 1 | | | 4 | | 3 | |
| | 4.1.2.Pengelola Sistem dan Jaringan | | | | 1 | | 1 | |
| | 4.1.3.Pengelola Data | | | | 6 | | 6 | |
| | 4.1.4.Analisis Sistem Informasi | 1 | | | 5 | | 4 | |
| | 4.1.5.Programmer | | | 3 | | 3 | | 3 |
| | 4.1.6.Designer | | | 3 | | 3 | | 3 |
| | 4.1.7.Surveyor | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ***4.2. Kasi Tata Kelola e-Government*** | 1 | | | | | | |
| | 4.2.1. Analis Sistem Informasi dan di Desiminasi | | | | 1 | | 1 | |
| | 4.2.2. Pengelola Data. | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | ***4.3.Kasi Pengembangan Ekosistem e-Government*** | 1 | | | | | | |
| | 4.3.1.Analis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum | | | | 1 | | 1 | |
| | 4.3.2.Pengolah Data | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| **5** | **Kepala Bidang Tekhnologi Informasi** | | | | | | | |
| | ***5.1. Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan*** | | | | | | | |
| | 5.1.1.Pengendali Jaringan Komunikasi | | | | 1 | | 1 | |
| | 5.1.2.Pengelola Sistem dan Jaringan | 1 | | 6 | 1 | | 2 | |
| | 5.1.3.Pengelola Tekhnologi Informasi | 1 | | | | | 1 | |
| | 5.1.4.Tekhnisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi | | | | 1 | | 1 | |

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Semester 1 Tahun 2019 ) | | | Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | P3K | NON PNS | PNS | P3K | PNS | P3K |
| | ***5.2.Kepala Seksi Infrastruktur Pusat Data*** | 1 | | | | | | |
| | 5.2.1. Analis | | | | | | 1 | |
| | 5.2.2.Pengolah Data | | | | | | 2 | 2 |
| | 5.2.3.Pengendali Tekhnologi Informasi | | | | | | 3 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | ***5.3.Kepala Seksi Keamanan Informasi & Persandian*** | 1 | | | | | 1 | |
| | 5.3.1. Analis Persandian | | | | 1 | | 1 | |
| | 5.3.2.Pengelola Keamanan Sistem Informasi | 1 | | | | | 1 | |
| | 5.3.3.Operator Sandi | 1 | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| **6** | **Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik** | 1 | | | | | | |
| | ***6.1.Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik*** | 1 | | | | | | |
| | 6.1.1.Analis Berita | | | | 2 | | 2 | |
| | 6.1.2.Pengelola Informasi | | | | 1 | | 1 | |
| | 6.1.3.Verifikator | | | 12 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ***6.2.Kepala Seksi Kemitraan Media Publik*** | 1 | | | 1 | | | |
| | 6.2.1.Analis System Informasi dan Diseminasi Hukum | 1 | | | 2 | | | |
| | 6.2.2.Pengelola TV dan Radio | 3 | | 8 | | | | |
| | 6.2.3.Analis Publikasi | | | | 2 | | | |
| | 6.2.4.Analis Kemitraan | | | | 2 | | | |
| | 6.2.5.Pengelola Media Center dan Kemitraan Media | | | | 3 | | | |
| | 6.2.6.Pengadministrasian Analis & Kemitraan Media | | | | 2 | | | |
| | 6.2.7.Penyiar | | | | 2 | 4 | | |
| | 6.2.8.Peliput | | | | 2 | 4 | | |
| | 6.2.9.Editing | | | | 2 | 4 | | |
| | 6.2.10.Operator | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | ***6.3.Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik*** | 1 | | | | | | |
| | 6.3.1. Analis Berita | | | | 2 | | 2 | |
| | 6.3.2. Pengelola Website dan Media Sosial | | | | 2 | | 2 | |

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat ini (s.d Semester 1 Tahun 2019 ) | | | Jml Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jml Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | P3K | NON PNS | PNS | P3K | PNS | P3K |
| | 6.3.3. Konten Kreator | | | | 3 | | 3 | |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

e. Tabel 2.6 Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor:

| No | Nama Jabatan | Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019) | | | Rencana Jml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya |
| 1 | **Kepala** | | | | | 1 | |
| 2 | **Sekretaris Bidang** | | | | | | |
| | ***2.1.Kepala Sub Bagian Keuangan*** | | | | | | |
| | 2.1.1.Bendahara Pengeluaran | | | | 1 | | |
| | 2.1.2.Verifikator Data Laporan Keuangan | | | | 1 | | |
| | 2.1.3.Administrasi Keuangan | | | | | | |
| | 2.1.4.Pengelola Keuangan | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | ***2.2.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan*** | | | 1 | | | 1 |
| | 2.2.1.Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | | | 1 | | | 1 |
| | 2.2.2.Pengelola Bahan Perencanaan | | | | | | 1 |
| | | | | | | | |
| | ***2.3.Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*** | | 1 | | | | |
| | 2.3.1. Analis Kepegawaian | | | | 1 | | |
| | 2.3.2. Analis SDM Aparatur | | | | 1 | | |
| | 2.3.3.Pengelola Rumah Tangga | | | | | | |
| | 2.3.4.Pengelola BMD | | | | 1 | | |
| | 2.3.5.Pengadmimistrasian Umum | | | | 1 | | |
| | | | | | | | |
| 3 | **Kepala Bidang Statistik Sektoral** | | 1 | 1 | | | |
| | ***3.1. Kepala Seksi Kompilasi Data*** | 1 | 1 | | | | 1 |

| No | Nama Jabatan | Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019) | | | Rencana Jml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya |
| | 3.1.1, Analis Statistik | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.1.2 Analis Sistem Informasi | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.1.3.Pengolah Data | 1 | | | | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | ***3.2.Kepala Seksi Pengolahan Data*** | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.2.1.Analisis Statistik | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.2.2.Analis Sistem Informasi | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.2.3.Pengolah Data | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | ***3.3.Kepala Seksi Penyajian Data*** | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.3.1.Analisis Statistik | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.3.2.Analisis Sistem Informasi | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.3.3.Pengolah Data | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 3.3.4.Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | **Kepala Bidang Layanan dan E-goverment** | | | | | | |
| | ***4.1.Kasi Pengembangan Aplikasi dan Sistem*** | | 1 | | 2 | 1 | 4 |
| | ***Integrasi*** | | | | | | |
| | 4.1.1.Pengelola Situs/Web | | | | 4 | | |
| | 4.1.2.Pengelola Sistem dan Jaringan | | | | 1 | | |
| | 4.1.3.Pengelola Data | | | | 6 | | |
| | 4.1.4.Analisis Sistem Informasi | | | | 5 | | |
| | 4.1.5.Programmer | | | | | | |
| | 4.1.6.Designer | | | | | | 3 |
| | 4.1.7.Surveyor | | | | | | 3 |
| | | | | | | | |
| | ***4.2. Kasi Tata Kelola E-Government*** | | 1 | | | 1 | |
| | 4.2.1. Analis Sistem Informasi dan di Desiminasi | | | | | | |
| | 4.2.2. Pengelola Data. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ***4.3.Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government*** | | 1 | | | 1 | |
| | 4.3.1.Analis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum | | | | 1 | | 3 |
| | 4.3.2.Pengolah Data | | | | 1 | | 3 |
| | | | | | | | |

| No | Nama Jabatan | Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019) | | | Rencana Jml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya |
| **5** | **Kepala Bidang Tekhnologi Informasi** | | | | | | |
| | ***5.1. Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan*** | | | | | | |
| | 5.1.1.Pengendali Jaringan Komunikasi | | | | | 1 | |
| | 5.1.2.Pengelola Sistem dan Jaringan | | 1 | | | 2 | |
| | 5.1.3.Pengelola Tekhnologi Informasi | | 1 | | | 1 | |
| | 5.1.4.Tekhnisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi | | | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| | ***5.2.Kepala Seksi Infrastruktur Pusat Data*** | | | | | | |
| | 5.2.1. Analis | | | | | 1 | - |
| | 5.2.2.Pengolah Data | | | | | 2 | 2 |
| | 5.2.3.Pengendali Tekhnologi Informasi | | | | | 3 | 6 |
| | | | | | | | |
| | ***5.3.Kepala Seksi Keamanan Informasi & Persandian*** | | | | | 1 | |
| | 5.3.1. Analis Persandian | | | | 1 | | |
| | 5.3.2.Pengelola Keamanan Sistem Informasi | | | | 1 | | |
| | 5.3.3.Operator Sandi | | | | 1 | | |
| | | | | | | | |
| **6** | **Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik** | | | | | | |
| | ***6.1.Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik*** | 1 | | | | | |
| | 6.1.1.Analis Berita | | | | 1 | | 1 |
| | 6.1.2.Pengelola Informasi | | | | 1 | | 1 |
| | 6.1.3.Verifikator | | | | | | 1 |
| | | | | | | | |
| | ***6.2.Kepala Seksi Kemitraan Media Publik*** | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | 6.2.1.Analis System Informasi dan Diseminasi Hukum | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 6.2.2.Pengelola TV dan Radio | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 6.2.3.Analis Publikasi | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 6.2.4.Analis Kemitraan | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 6.2.5.Pengelola Media Center dan Kemitraan Media | | | | 1 | 1 | 1 |
| | 6.2.6.Pengadministrasian | | | | 1 | 1 | 1 |

| No | Nama Jabatan | Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester 1 Tahun 2019) | | | Rencana Jml SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya | Fungsional | Struktural | Tehnis Lainnya |
| | Analis & Kemitraan Media | | | | | | |
| | 6.2.7.Penyiar | | | | | | |
| | 6.2.8.Peliput | | | | | | |
| | 6.2.9.Editing | | | | | | |
| | 6.2.10.Operator | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ***6.3.Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik*** | 1 | | | | | |
| | 6.3.1. Analis Berita | | | | 2 | | |
| | 6.3.2. Pengelola Website dan Media Sosial | | | | 2 | | |
| | 6.3.3. Konten Kreator | | | | 3 | | |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

### 2.2.2.Sarana dan Prasarana

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 6 | unit |
| 2 | Kendaraan Roda 2 Matic 150 cc | 9 | unit |
| 3 | PC | 54 | unit |
| 4 | Laptop core i3 | 2 | unit |
| 5 | Printer inkjet | 6 | unit |
| 6 | AC | 20 | unit |
| 7 | Mesin Tik Elektrik | 2 | unit |
| 8 | Mesin Penghancur | 2 | unit |
| 9 | Dispenser | 4 | unit |
| 10 | Kulkas 2 Pintu | 2 | unit |
| 11 | Vacuum Cleaner 1000 watt | 2 | unit |
| 12 | Lemari Besi | 2 | unit |
| 13 | Filling Cabinet | 5 | unit |
| 14 | Kursi Kerja Putar | 34 | unit |
| 15 | Meja Kerja | 40 | unit |
| 16 | Kursi Tamu | 2 | unit |
| 17 | Laptop core i7 | 1 | unit |
| 18 | Laptop core i5 | 1 | unit |
| 19 | Laptop ( berbagai merk ) | 13 | unit |
| 20 | Hardisk External | 4 | unit |
| 21 | Monitor 21.5 | 1 | unit |
| 22 | Proyektor | 4 | unit |
| 23 | Layar Proyektor | 3 | unit |
| 24 | Lemari Rak Arsip Kayu | 17 | unit |
| 25 | Anjungan Informasi Publik | 18 | unit |
| 26 | Server | 12 | Paket |
| 27 | Genset | 1 | unit |
| 28 | CCTV Taman Kota | 7 | unit |
| 29 | CCTV Monitoring | 34 | unit |
| 30 | Handy Talky | 23 | unit |
| 31 | Drone | 3 | unit |
| 32 | Action Camera | 1 | unit |
| 33 | Camera | 3 | unit |
| 34 | Tripod | 5 | unit |
| 35 | Printer Epson | 14 | unit |
| 36 | Lemari Locker | 1 | unit |
| 37 | Microphone Headseat | 17 | unit |

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 38 | Anti Virus Sophos | 1 | Paket |
| 39 | Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor<br>Jalur Bogor Barat dan Jalur Kelurahan Loji | 1 | Paket |
| 40 | Jaringan FO Intranet Kota Bogor<br>Jalur TanahSareal Rute Sukaresmi-Sukadamai | 1 | Paket |
| 41 | Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure Cipaku – Pamoyanan | 1 | Paket |
| 42 | Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor<br>Rute Cibuluh - Tanah Baru | 1 | Paket |
| 43 | Pengadaan jaringan FO Intranet Kota Bogor Closure PUPR dan BPKSDA (Gedung Baru) | 1 | Paket |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Tabel 2.7***
***Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian***

**Tabel 2.8Rencana Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor**

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH KONDISI SAAT INI | | | JUMLAH RENCANA PEMELIHARAAN | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kondisi Akhir |
| 1 | Gedung Untuk Kantor Baru | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mobil | 6 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Sepeda Motor | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Penghancur Kertas | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Meja | 51 | 4 | 11 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 6 | Kursi Sandaran Sedang | 61 | 1 | 16 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 7 | Penghancur Kertas | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Lemari Besi | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Filling Kabinet | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Rak Arsip Besi | 0 | | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | AC | 18 | | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12 | Lemari Pendingin / Kulkas | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Dispenser | 3 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Lemari Kayu | 12 | | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | Kursi Hadap | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | Personal Komputer | 52 | 2 | 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 17 | Laptop | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18 | Printer Scanner | 17 | | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19 | Tripod | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Sound System Outdor | 0 | | | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kompor Gas | 0 | | | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Server Blade center S PC 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Server Blade center S PC 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Server Blade center S PC 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Server Blade center S PC 4 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Server Blade center S PC 5 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Server Blade center S PC 6 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Server Blade center H PC 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Server Blade center H PC 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Server Blade center H PC 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Server Blade center H PC 4 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Xen Server DNS | | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rack 42u1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Rack 42u2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Rack 42u3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Rack 42u4 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Rack 30u | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | UPS ara kawa | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | UPS Emerson | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | KVM Oxca | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Storawage lbm | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Fiber Optik | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Wifi Publik | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH KONDISI SAAT INI | | | JUMLAH RENCANA PEMELIHARAAN | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kondisi Akhir |
| 44 | Wireless | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Pen Tab | | | | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 46 | Kamera | 3 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47 | Drone | 3 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | Jammer | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 49 | Metal Detector | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | Bug detector | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Radio HT | 14 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 52 | Firewall (Software ) | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Anti Virus (Software) | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Operation System Windows (Software ) | | | | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Microsoft Office (Software ) | | | | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Hard Disk External | | | | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Televisi | 2 | | | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Sofa (full set) | | | | 1 | - | - | - | - | - |
| 59 | Camera Handycam | 2 | | | 1 | - | - | 1 | | |
| 60 | Lensa | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Drone DJI Phantom | | | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Tripod | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 63 | Clip on Wireless | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 65 | Video Sender | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Lampu Aputure | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Camera Canon 70D | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | Camera DSLR | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 69 | Drone Mavic Pro | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Imac | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | Vmix Live | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Camcorder | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 73 | High chair | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74 | Lisensi Sistem OPr. Windows | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Lisensi Anti Virus | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Lisensi SSL | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Lisensi Firewall | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | CCTV (Paket) | 31 | | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 79 | Grounding (1 Paket) | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

**Tabel 2.9 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor**

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH KONDISI SAAT INI | | | JUMLAH RENCANA PENGADAAN | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kondisi Akhir |
| | **PENGADAAN BARANG** | | | | | | | | | |
| 1 | Gedung Untuk Kantor Baru | | | | - | 1 | - | - | - | 1 |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH KONDISI SAAT INI | | | JUMLAH RENCANA PENGADAAN | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kondisi Akhir |
| 2 | Mobil | 6 | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Sepeda Motor | 8 | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Penghancur Kertas | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Meja | 51 | 4 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 48 |
| 6 | Kursi Sandaran Sedang | 61 | 4 | 16 | | 12 | 10 | 7 | 6 | 35 |
| 7 | Penghancur Kertas | 1 | 1 | | | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | Lemari Besi | 3 | 1 | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | Filling Kabinet | 5 | | | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| 10 | Rak Arsip Besi | 0 | | | | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | AC | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Lemari Pendingin / Kulkas | 3 | | | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 13 | Dispenser | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Lemari Kayu | 12 | | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 15 | Kursi Hadap | 10 | | | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | Personal Komputer | 52 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 13 | 6 | 43 |
| 17 | Laptop | 11 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 31 |
| 18 | Printer Scanner | 17 | | 1 | 1 | 15 | 13 | 16 | 12 | 57 |
| 19 | Tripod | 2 | | | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 20 | Sound System Outdor | 0 | | | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 21 | Kompor Gas | 0 | | | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 22 | Server Blade center S PC 1 | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Server Blade center S PC 2 | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Server Blade center S PC 3 | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Server Blade center S PC 4 | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Server Blade center S PC 5 | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Server Blade center S PC 6 | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Server Blade center H PC 1 | 1 | | | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 29 | Server Blade center H PC 2 | 1 | | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 30 | Server Blade center H PC 3 | 1 | | | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 31 | Server Blade center H PC 4 | 1 | | | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 32 | Xen Server DNS | - | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Rack 42u1 | 1 | | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 34 | Rack 42u2 | 1 | | | - | | 1 | | - | 1 |
| 35 | Rack 42u3 | 1 | | | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 36 | Rack 42u4 | 1 | | | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37 | Rack 30u | 1 | | | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 38 | UPS ara kawa | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 39 | UPS Emerson | 1 | | | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 40 | KVM Oxca | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Storawage lbm | 1 | | | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 42 | Fiber Optik | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Wifi Publik | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Wireless | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Pen Tab | | | | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Kamera | 3 | 1 | | - | 2 | - | 4 | 3 | 9 |
| 47 | Drone | 3 | | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 48 | Jammer | 2 | | | - | - | - | - | - | - |

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH KONDISI SAAT INI | | | JUMLAH RENCANA PENGADAAN | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Kondisi Akhir |
| 49 | Metal Detector | 2 | | | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Bug detector | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Radio HT | 14 | | | - | 4 | - | 4 | - | 8 |
| 52 | Firewall (Software ) | 1 | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 53 | Anti Virus (Software) | | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 54 | Operation System Windows (Software ) | | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 55 | Microsoft Office (Software ) | | | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 56 | Hard Disk External | 4 | | | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 57 | Televisi | 2 | | | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Sofa (full set) | | | | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 59 | Camera Handycam | 2 | | | 1 | - | - | 1 | | 1 |
| 60 | Lensa | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Drone DJI Phantom | | | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 62 | Tripod | 3 | | | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Clip on Wireless | 4 | | | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Video Sender | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Lampu Aputure | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Camera Canon 70D | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Camera DSLR | 3 | | | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Drone Mavic Pro | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Imac | 3 | | | - | 1 | - | - | - | - |
| 71 | Vmix Live | 1 | | | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Camcorder | 3 | | | - | - | - | - | - | - |
| 73 | High chair | 2 | | | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Karpet | | | 1 | 2 | | | | | 2 |
| 75 | Audio Mixer | | | | 1 | | | | | 1 |
| 76 | Proyektor | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 77 | Multy Interaktif Sistem | | | | 1 | | | | | 1 |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

## 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Diskominfostandi berdasarkan sasaran/target Renstra Diskominfostandi periode sebelumnya sebagaimana tercantum pada tabel 2.1.1 Pencapaian Kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor selengkapnya pada Tabel 2.1.2.

Dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan selalu adanya hambatan dan kendala. Dibawah ini beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam mencapai target indikator sasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.1antara lain:

1. Perencanaan yang disusun masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
2. Prasarana dan sarana yang kurang memadai;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur;
4. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program dankegiatan;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan baik.

Permasalahan timbul akibat tidak sesuainya rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Upaya pemecahan terhadap hambatan dan kendala tersebut antara lain:

1. Pemenuhan terhadap prasara dan sarana penunjang;
2. Peningkatan kualitas aparatur misalnya antara lain melalui diklat, pelatihan, tugas belajar;
3. Dalam penganggaran untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan perencanaan;
4. Adanya Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan baik.

Untuk rasio anggaran dan realisasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9, pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 dapat dikatakan baik karena rasio diatas 90% yaitu sebesar 95,14% pada tahun 2017 dan 95,13% pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2015 dan tahun 2016rasio anggaran dan realisasi dikatakan kurang baik dikarenakan belum mencapai hasil yang maksimal yaitu sebesar diatas 90%, hal ini dikarenakan program pelaksanaan dari kegiatan tersebut belum maksimal sehingga perlu evaluasi lebih lanjut.Adapun pada tahun 2019 sampai dengan bulan November rasio sudah mencapai 85,16%.

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 1. Analisis Lingkungan Internal

#### a. Kekuatan/ *Strenght* (S)

- Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Informatika dan Komunikasi;
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- Peraturan Wali Kota BogorNomor 97 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor.
- Tersedianya beberapa peraturan Wali Kota Bogor dibidang Teknologi Informasi dan penyelenggaraan *e-Government*;
- Terintegrasinya layanan pengaduan non kedaruratan dan kedaruratan untuk mengatasi adanya kesenjangan layanan pengaduan masyarakat.

#### b. Kelemahan/ *weakness* (W)

- Gedung kantor dan perlengkapan kantor yang kurang representatif;
- Terbatasnya ketersediaan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur TIK;
- Keterbatasan dalam pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana TIK;

- Terbatasnya pegawai/aparatur yang berkompetensi dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian khususnya tenaga teknis dan ahli;
- Terbatasnyaprasarana dan sarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar;
- Belum optimalnya pengamanan informasi dan persandian;
- Belum terintegrasinya semua Sistem Informasi dan Database Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya diseminasi informasi dan pengembangan aplikasi TIK.

**2. Analisis Lingkungan Eksternal**

**a. Kekuatan/ *Strenght* (S)**

- Komitmen Pimpinan daerah;
- Perangkat Daerah sudah memiliki Sistem Informasi untuk data dan pelayanannya.

**b. Kelemahan/ *weakness* (W)**

- Sistem Informasi yang dibangun di Perangkat daerah belum sesuai standar sesuai Peraturan Wali Kota;
- Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap perkembangan TIK yang cukup pesat.

Berdasarkan analisis terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019-2024 dapat digambarkan bahwa terdapat tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayananan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor pada 5 (lima) tahun yang akan datang antara lain:

**1. Peluang**

a. Adanya Buku Rencana Induk Pengembangan *e-Government*2014-2018 dan hasil reviunya sebagai acuan dalam pembuatan *Masterplan e-Government* 2020;
b. Reviu *Masterplan* Bogor *Smartcity* 2017-2021;
c. Komitmen Kepala Daerah terhadap penerapan *e-Government* dan perwujudan *Smartcity* Kota Bogor;

d. Komitmen kepala daerah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
e. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi Pemerintah Daerah;
f. Regulasi Pemerintah Pusat tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral;
g. Bimbingan teknis aparatur tentang keamanan sistem informasi.

**2. Tantangan**

a. Implementasi *Masterplan e-Government* dan *Masterplan Bogor Smartcity*;
b. Peningkatan infrastruktur pengelolaan TIK;
c. Integrasi data urusan pemerintahan daerah Kota Bogor;
d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
e. Peningkatan kapasitas SDM sertaprasarana dan sarana untuk keamanan sistem informasi.

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

## 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor yang mengampu 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Hal ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun ke depan yaitu Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024.

Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Tabel berikut menampilkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor yang dikelompokkan menurut pembagian urusan yang diselenggarakan.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|---|
| 1. | Tidak tercapainya target nilai penyelenggaraan e-*Government* | Nilai dimensi kelembagaan dalam penilaian indeks e-*Government* Kota Bogor masih dibawah 3 | Kepala Dinas Kominfostandi belum berperan dan berfungsi sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Kota Bogor |

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|---|
| | | | Kurangnya SDM TIK yang kompeten |
| | | Nilai dimensi infrastruktur dalam penilaian indeks *e-Government* Kota Bogor masih dibawah 3 | Gedung kantor dan perlengkapan kantor yang kurang representatif dan Lokasi penempatan ruang server masih belum memenuhi standar |
| | | | Layanan konektivitas dan jaringan belum stabil |
| | | Kesenjangan layanan pengaduan masyarakat | Penerimaan pengaduan non kedaruratan (call center) hanya berlaku di jam kerja dan hari kerja sedangkan layanan kedaruratan (NTPD) beroperasi selama 24 jam setiap hari selama setahun |
| 2. | Belum terselenggaranya statistik sektoral | Tusi masih tumpang tindih dengan perangkat daerah lain | Belum menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral |
| 3. | Adanya ancaman terhadap keamanan aset informasi | Terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi | Belum tersedianya regulasi yang mengatur keamanan informasi |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

## 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Walikota Bogor sebagai visi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

**"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"**

Kota Yang Ramah Keluarga mengandung makna:

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 maka ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat;
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas;
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera.

Berdasarkan rumusan misi Walikota Bogor dalam dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah guna mendukung keberhasilan Visi Wali Kota Bogoradalah sebagaimana dirumuskan dalam misi yang keduayaitu **"Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas"**.

**Kota Bogor Yang Cerdas** adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*under-standing*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota.

Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

**Tujuan** yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Misi Kedua tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor adalah **"Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani(*Smart Government*)"**.

Sedangkan **sasaran** yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah **"Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel"**.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerahterhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| **Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga** | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas** | | | |
| **Tujuan/Sasaran Kepala Daerah** | **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah** | **Faktor** | |
| | | **Penghambat** | **Pendorong** |
| **Tujuan :**<br>Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*)<br><br>**Sasaran :**<br>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | - Program yang dilaksanakan harus berkelanjutan (*suistanable*).<br>- Banyaknya program *Smartcity* yang belum tersosialisasikan sampai ke tatanan masyarakat umum.<br>- Perlunya pendidikan yang terkait dengan bidang TIK pada level sekolah (dini), seperti penggunaan internet secara cerdas dan peningkatan fungsi | - Anggaran untuk kegiatan *Smart Government* masih sangat kurang memadai hal ini menyulitkan inovasi-inovasi yang ingin dilakukan.<br>- Masih kurangnya kontribusi pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan. | - Kuatnya komitmen dari Pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas.<br>- Kuatnya partisipasi dari masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan di Kota Bogor. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dari internet bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan nilai ekonomis dari usahanya.<br>- Keterbatasan prasarana dan sarana serta SDM aparatur untuk melakukan pelayanan.<br>- Kurangnya kualitas dari para ASN untuk bidang TIK. | | |
| | - Belum stabilnya akses internet di semua Perangkat Daerah.<br>- Masih banyaknya server yang berada di luar data center Dinas Kominfostandi. | - Anggaran terbatas untuk pemeliharaan dan pemasangan baru akses internet.<br>- Anggaran terbatas untuk membangun ruang server yang layak. | - Komitmen Kepala Daerah tentang pelayanan *Smart Government*. |
| | - Kualitas pelayanan pengaduan belum maksimal.<br>- Tindak lanjut pelayanan pengaduan perangat daerah masih memerlukan waktu penyelesaian yang lama. | - Alur Birokrasi yang panjang.<br>- Kurangnya sosialisasi sarana layanan pengaduan kepada masyarakat.<br>- Terbatasanya prasarana dan sarana.<br>- SDM Verifikator kurang memahami tugas dan fungsinya.<br>- Masyarakat yang selalu ingin pengaduannya cepat dilayani/ ditindaklanjuti.<br>- Masih tumpang tindih pelaksanaan tugas kemitraan media dengan humas. | - Prasarana dan sarana layanan penanganan pengaduan masyarakat.<br>- Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelayanan penanganan pengaduan masyarakat.<br>- Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 486.45-234 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah Kota Bogor. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat. |
| | Adanya ancaman terhadap keamanan sistem informasi. | Keterbatasan SDM yang memadai dibidang kemanan informasi. | Adanya antivirus, firewall, dan SOP tentang Keamanan Informasi. |
| | - Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral yang mendukung kebijakan satu data. | - Belum adanya regulasi untuk mendukung terlaksananya kebijakan satu data Kota Bogor.<br>- Belum tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral.<br>- Belum tersedianya SDM analis statistik data dan pengolah data yang kompeten untuk membantu proses pelaksanaan statsitik sektoral. | Telah tersedia aplikasi yang dapat mendukung proses pelaksanaan kebijakan satu data seperti Portal Data, SIMATA dan Data*warehouse*. |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

## 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogoryang mempengaruhi pencapaian sasaranKementerian Komunikasi danInformatikaberdasarkan hasil telaah terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

| Sasaran Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | **Penghambat** | **Pendorong** |
| Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan. | Banyaknya program *Smartcity* yang belum tersosialisasikan sampai ke tatanan masyarakat umum . | Keterbatasan prasarana dan sarana, SDM aparatur TIK serta kesenjangan kemampuan pelaksanaan TIK di masyarakat. | Kuatnya komitmen dari Pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang cerdas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. |
| Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan sosial budaya, pertahanan dan keamanan | Penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya | | - Pengembangan infrastruktur jaringan yang terus dilakukan diKotaBogor.<br>- Penyediaan akses internet publik telah tersedia pada area publik melalui pembangunan wifi publik. |
| Terselenggaranya tatakelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman | Penerapan kebijakan internal tatakelola komunikasi dan informatika belum optimal | Beberapa Kebijakan Internal terkait tatakelola komunikasi dan informatika masih dalam bentuk konsep dan belum dimasukkan kedalam kebijakan Peraturan Wali Kota | - Dokumen *Masterplan* TIK<br>- Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Induk*e-Government*<br>- Surat Keputusan Dewan *Smartcity* tahun 2017 yang mendukung penerapan SPBE |
| Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien | Pembangunan sistem yang terintegrasi dalam menerapkan *e-goverment* | Penggunaan aplikasi umum berbagi masih diterapkan di sebagian Perangkat Daerah | Komitmen Kepala Daerah tentang pelayanan *Smart Government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik |

*Sumber : Renstra Kemenkominfo*

## 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Bogor 2011-2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan tata ruang berwawasan lingkungan untuk mendukung kota jasa yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah dimaksud ditetapkan strategi pemanfaatanruang wilayah meliputi:

1. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
3. kebijakan dan strategi pengembangankawasan strategis.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dalam menanggapi isu rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis telah merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain: Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota; Pembangunan Wifi Ruang Publik; Pemeliharaan Jaringan intranet dan internet (b*ackbone*) Kota Bogor; Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat; Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor.

## 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil reviu terhadap:

1. Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor;
2. Analisa berbagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor;
3. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika;

4. Dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor melalui proses identifikasi permasalahan menurut bidang dan pembagian urusan konkuren pemerintah daerah yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai berikut:
   - Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   - Kebijakan pengembangan Smartcity di Indonesia melalu program Gerakan Menuju 100 *Smartcity* Indonesia;
   - Belum adanya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Urusan Konkuren Komunikasi dan Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
   - Infrastruktur layanan konektivitas dan jaringan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Kota Cerdas sesuai dengan Standar Nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
   - Integrasi layanan pengaduan nonkedaruratan dan kedaruratan harus dilakukan untuk mengatasi adanya kesenjangan layanan pengaduan masyarakat;
   - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan statistik serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, harus menjadi satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah;
   - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan bahwa urusan persandian serumpun pada urusan komunikasi dan informatika dan wajib menyelenggarakan penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

# BAB IV
# TUJUANDAN SASARAN

## TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019-2024 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan kualitas *smart government* | Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* | Nilai Indeks Evaluasi SPBE |
| | | | Peningkatan layanan pengaduan masyarakat |
| | | Tersedianya data statistik sektoral | Jumlah penyajian statistik sektoral |
| 2 | Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas | Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas |
| | | | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Tabel 4.1.***
***Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian***

Tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, dapat di lihat pada Tabel 4.2.dibawah ini:

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Peningkatan Kualitas *Smart Government* | Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* | Nilai Indeks Evaluasi SPBE | 2.92 | 2.92 | 2,93 | 2.93 | 2.94 |
| | | | Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% |
| | | Tersedianya Data Statistik Sektoral | Jumlah Penyajian Statistik Sektoral | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas | B | BB | BB | BB | A |
| | | | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Tabel 4.2***
***Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian***

Alur penetapan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian dapat digambarkan sebagai berikut:

*Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024*

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, diperlukan langkah-langkah strategi dan kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

| **VISI : Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **MISI : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas** | | | |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **STRATEGI** | **KEBIJAKAN** |
| Peningkatan kualitas *smart government* | Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* | Meningkatkan tata kelola kelembagaan. | Meningkatkan peran Dinas Kominfostandi sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO)Kota Bogor. |
| | | | Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM TIK. |
| | | Meningkatkan kapasitas infrastruktur TIK. | Peningkatan prasarana dan sarana data center sesuai standar. |
| | | | Penyediaan jaringan fiber optik di perangkat daerah. |
| | | | Penetapan regulasi pengelolaan server. |
| | | | Memenuhi Kebutuhan Server *Back Up Data* dan DRC. |
| | | | Penyediaan dan Pemeliharaan CCTV. |
| | | | Melaksanakan penataan dan pemeliharaan CCTV se-Kota Bogor. |
| | | | Melaksanakan Layanan Telekonferensi Pemerintah. |
| | | Meningkatkan Layanan Interoperabilitas. | Menyelenggarakan Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi bagi Seluruh Perangkat Daerah dengan menetapkan standar format data dan aplikasi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Menyelenggarakan Layanan *Application Programm Interface* (API) daerah. |
| | | | Melaksanakan layanan *Repository/Datawarehouse*. |
| | | | Penetapan Regulasi tentang Hak Akses, Pengelolaan Data Base dan *Datawarehouse*. |
| | | | Meningkatkan jumlah sistem informasi yang di integrasikan. |
| | | Kerjasama Informasi dengan Media Massa | Penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat berbasis elektronik dan media cetak. |
| | | Menyediakan sarana dan prasarana keamanan informasi | Merumuskan regulasi yang mengatur tentang keamanan informasi. |
| | | Mengatasi kesenjangan waktu pelayanan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik | Integrasi layanan pengaduan non kedaruratan (*call center*) dengan layanan kedaruratan (NTPD) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari |
| | Tersedianya data statistik sektoral | Meningkatkan kerjasama pengelolaan satu data statistik sektoral yang berkualitas melalui komunikasi dan pertukaran data | Menjadikan Diskominfostandi sebagai satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral |
| Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas | Menciptakan tata kelola profesional dengan tertib administrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran | Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien |

*Sumber : Diskominfominfostandi Tahun 2019*

***Tabel 5.1***
***Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian***

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor sesuai dengan pendanaan indikatif ditetapkan sebagai berikut:

1. ***Program Administrasi Perkantoran***
   1) Pengelolaan Rumah Tangga PD;
2. ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***
   1) Pengadaan Inventaris Kantor;
   2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor;
3. ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***
   1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD;
4. ***Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***
   1) Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE;
   2) Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor;
   3) Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
   4) Relokasi dan Revitalisasi Ruang Kendali Jaringan dan Server;
   5) Pengadaan Infrastruktur Ruang Kendali Jaringan dan Server;
   6) Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur Ruang Kendali Jaringan dan Server;
   7) Pengelolaan *Data Recovery Center* (DRC);
   8) Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota;
   9) Pembangunan Wifi Ruang Publik
   10) Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet (*backbone*) Kota Bogor;
   11) Pemeliharaan Wifi Ruang Publik;
   12) Pemeliharaan *Grounding* Listrik dan *Erester*;

13) Pengelolaan *Bandwith*;
14) Pengadaan CCTV Kota Bogor;
15) Pemeliharaan CCTV Kota Bogor;
16) Pemeliharaan *Teleconference* Kota Bogor;
17) Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room dan *Command Center*, Server Data dan Aplikasi;
18) Pembangunan *Command Center*;
19) Digitalisasi Profil dan Pengembangan/Promosi Ekosisteme-*Government* dan *Smart City*;
20) Pengembangan Datawarehouse dan Sistem Informasi Kota (SIMATA);
21) Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi;
22) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi;
23) Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi;
24) Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia;
25) Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat.

***5. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah***

1) Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
2) Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah.

**6. Program Pengembangan Data dan Informasi**

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID;
2) Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan.

***7. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral***

1) Pengelolaaan Statistik Sektoral;
2) Satu Data Statistik Sektoral;
3) Penyajian Statistik Sektoral.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Perlunya suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadahi, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor yaitu:

- Misi Kedua : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.
- Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*).
- Sasaran : Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019 - 2024.

*Tabel 7.1*

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan SasaranRPJMD**

| NO. | INDIKATOR | Konidisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Konidisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 57 | 66 | 74 | 81 | 88 | 100 | 100 |
| 2 | Hasil Penilaian SPBE | 2,91 | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,94 |
| 3 | Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi | 7 | 14 | 21 | 28 | 34 | 41 | 41 |
| 4 | Persentase Keterbukaan Informasi publik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6 | Data basis pembangunan daerah | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 7 | Buku ”kabupaten dalam angka” | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 8 | Buku ”PDRB” | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 9 | Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email Daerah | NA | 20% | 30% | 60% | 70% | 80% | 80% |

*Sumber : RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024*

# BAB VIII
# PENUTUP

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut melalui berbagai teknik analisis, diantaranya analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Dan Kepala Perangkat Daerah harus melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda Kota Bogor untuk sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor Tahun 2019-2024 agar dapat dijadikan sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

**WALI KOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**

**Tabel 2.1.1**
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
**KOTA BOGOR**

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Sasaran/Target Renstra | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | | | *(6)* | *(7)* | *(8)* | | | *(9)* | *(10)* | *(11)* | | | *(12)* | *(13)* | *(14)* |
| 1 | Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi) | | | | 20 | 5 | 5 | 36 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 100% | 100% | 100% | 28% | 13% |
| 2 | Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%) | | | | 3.88 | 12.62 | 15.53 | 18.45 | 20.39 | 3.88 | 12.62 | 15.53 | 18.45 | 20.39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik | | | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90,7 | 90,9 | 87,8 | 90,2 | 100 | 151% | 129% | 109% | 97% | 100% |
| 4 | Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/PD) | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselengara dengan baik (persandian) | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Diskominfominfostandi

**Tabel 2.1.2**
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
**KOTA BOGOR**

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(20)* | *(21)* |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 470,000,000 | 423,000,000 | 380,000,000 | 247,120,000 | 1,013,502,579 | 344,166,588 | 381,701,528 | 354,674,577 | 236,951,334 | 336,152,709 | 73.23 | 90.24 | 93.34 | 95.89 | 33.17 | 1.387 | 0.531 |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | 998,000,000 | 1,556,800,000 | 950,351,000 | 1,000,000,000 | 409,303,000 | 932,817,203 | 1,371,541,589 | 929,579,241 | 882,899,108 | 286,040,100 | 93.47 | 88.10 | 97.81 | 88.29 | 69.88 | 0.408 | 0.605 |
| **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | 35,000,000 | 47,300,000 | 47,500,000 | 45,800,000 | 14,000,000 | 31,782,500 | 35,212,500 | 44,018,000 | 45,313,000 | 6,023,600 | 90.81 | 74.45 | 92.67 | 98.94 | 43.03 | 0.406 | 0.130 |
| **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | 11,013,585,900 | 11,980,334,100 | 9,996,658,000 | 9,959,250,800 | 8,350,605,010 | 10,095,414,553 | 11,665,110,483 | 9,726,642,747 | 9,550,111,195 | 4,533,928,664 | 91.66 | 97.37 | 97.30 | 95.89 | 54.29 | 0.441 | 0.611 |
| **Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi** | | | 237,500,000 | 217,500,000 | 21,229,000 | | | 224,583,500 | 210,210,600 | 21,229,000 | | | 94.56 | 96.65 | 100 | 0.507 | 0.518 |

Sumber : Diskominfominfostandi

**Tabel 6.1**
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian**
**Kota Bogor**

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | | Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | | |
| '(1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| **Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 1 :** Peningkatan kualitas smart government | | | | **Nilai Indeks Evaluasi SPBE** | Indeks | 2.92 | | | | | | | | | | 2.94 | | | |
| | **Sasaran 1 :** Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan konsep Good Governance | | | Nilai Indeks Evaluasi SPBE | Indeks | 2.92 | | 2.92 | | 2.93 | | 2.93 | | 2.94 | | 2.94 | | | |
| | | **Program 1.1 : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | **1** | **Hasil Penilaian SPBE** | **Indeks** | **2.92** | **23,742** | **2.92** | **14,242** | **2.93** | **14,842** | **2.93** | **15,267** | **2.94** | **15,667** | **2.94** | **83,760** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.1 : Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE | 1 | Nilai Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 2.92 | 125 | 2.92 | 125 | 2.93 | 125 | 2.93 | 125 | 2.94 | 125 | 2.94 | 625 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Hak Akses terhadap 103 Aplikasi dan akan terus bertambah setiap tahunnya | Hak Akses | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | | Kegiatan 1.1.2 : Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor | 1 | Tersedianya keberlangsungan pengelolaan website Kota Bogor (colocation) | Bulan | 12 | 500 | 12 | 500 | 12 | 500 | 12 | 500 | 12 | 500 | 12 | 2,500 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Tersedianya outsourching pengelolaan website Kota Bogor | orang | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Terpeliharanya keberlangsungan server domain Kota Bogor | paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | Kegiatan 1.1.3 : Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik | 1 | Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE | Perwali | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 10 | 85 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.4 : Relokasi dan revitalisasi ruang kendali jaringan dan server | 1 | Tersedianya ruang kendali jaringan dan server | Paket | 1 | 10,000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 10,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.5 : Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server | 1 | Tersedianya perangkat ruang kendali jaringan dan server | Paket | 3 | 1,000 | 3 | 1,200 | 3 | 1,400 | 3 | 1,400 | 3 | 1,400 | 3 | 6,400 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.6 : Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server | 1 | Terpeliharanya Perangkat ruang kendali jaringan dan server | Paket | 1 | 600 | 1 | 700 | 1 | 800 | 1 | 900 | 1 | 1,000 | 1 | 4,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Tersedianya outsourching ruang kendali jaringan dan server | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Tertata dan terkelolanya ruang kendali jaringan dan server | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | | |
| | | Kegiatan 1.1.7 : Pengelolaan Data Recovery Center (DRC) | 1 | Tersedianya DRC | Paket | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 475 | 1 | 475 | 1 | 2,300 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Terpeliharanya perangkat data recovery center (DRC) | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Tersedianya perangkat server | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | Kegiatan 1.1.8 : Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota | 1 | Tersedianya jaringan FO di Perangkat Daerah | titik | 10 | 2,000 | 10 | 2,000 | 10 | 2,000 | 10 | 2,000 | 10 | 2,000 | 130 | 10,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.9 : Pembangunan Wifi Ruang Publik | 1 | Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi | titik | 10 | 200 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 80 | 600 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.10 : Pemeliharaan Jaringan intranet dan internet (backbone) Kota Bogor | 1 | Terpeliharanya jaringan intranet dan internet (backbone) dan tertatanya jaringan intranet LAN pada Perangkat Daerah se - Kota Bogor | titik | 146 | 2,000 | 146 | 2,100 | 146 | 2,200 | 146 | 2,300 | 146 | 2,400 | 146 | 11,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.11 : Pemeliharaan Wifi Ruang Publik | 1 | Terpeliharanya wifi ruang publik | titik | 50 | 150 | 60 | 175 | 65 | 200 | 70 | 225 | 75 | 250 | 75 | 1,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.12 : Pemeliharaan Grounding listrik dan erester | 1 | Terpeliharanya Grounding listrik dan erester Perangkat Daerah dan Kelurahan | titik | 8 | 200 | 7 | 175 | 6 | 150 | 5 | 125 | 4 | 100 | 4 | 750 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.13 : Pengelolaan Bandwith | 1 | Tersedianya bandwith internet se - Kota Bogor | Mbps | 1,000 | 5,000 | 1,100 | 5,100 | 1,200 | 5,200 | 1,300 | 5,300 | 1,400 | 5,400 | 1,400 | 26,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.14 : Pengadaan CCTV Kota Bogor | 1 | Jumlah titik CCTV | titik | 15 | 800 | 15 | 800 | 15 | 800 | 15 | 800 | 15 | 800 | 133 | 4,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.15 : Pemeliharaan CCTV Kota Bogor | 1 | Jumlah titik CCTV | titik | 58 | 500 | 73 | 600 | 88 | 700 | 103 | 800 | 118 | 900 | 118 | 3,500 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.16 : Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor | 1 | Terpeliharanya perangkat teleconference | Paket | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 1,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Tersedianya perangkat teleconference | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Tersedianya lisensi ID Teleconference | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | **Program 1.1 : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | **2** | **Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi** | **%** | **14** | **10,000** | **21** | **4,120** | **28** | **4,170** | **34** | **4,170** | **41** | **4,220** | **41** | **26,680** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.17 : Pengembangan dan pengelolaan Bogor Green Room dan Command Center, Server Data dan Aplikasi | 1 | Terpeliharanya Perangkat multimedia Bogor Green Room/Command Center | Paket | 1 | 1,500 | 1 | 1,000 | 1 | 1,050 | 1 | 1,050 | 1 | 1,100 | 1 | 5,700 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Terbangunnya dan Meningkatnya Fasilitas Command Center | Lokasi | 2 | | - | | - | | - | | - | | - | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | | |
| | | Kegiatan 1.1.18 : Pemindahan dan penataan ulang infrastruktur Command Center (Bogor Green Room) (APBD Provinsi) | 1 | Tersedianya command center yang memenuhi standar minimal sebagai Command Center, Monitoring center, dan Crisis Center | Paket | 4 | 5,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | **5,500** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.19 : Digitalisasi Profil dan Pengembangan/promosi ekosistem e-government dan smart city | 1 | Tersedianya reklame untuk promosi smart city | Paket | 1 | 940 | 3 | 940 | 3 | 940 | 3 | 940 | 3 | 940 | 3 | 4,700 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Tersedianya master plan smart city | Dokumen | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Tersedianya master plan e-government | Dokumen | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | Tersedianya anjungan promosi | Set | 7 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | | Kegiatan 1.1.20 : Pengembangan datawarehouse dan sistem informasi kota (SIMATA) | 1 | Tersedianya Paket Pengembangan Datawarehouse | Paket | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 4,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.21 : Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi | 1 | Sosialisasi/Diseminasi yang dilaksanakan per tahun | Pertemuan | 2 | 60 | 3 | 180 | 3 | 180 | 3 | 180 | 3 | 180 | 14 | 780 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.22 : Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi | 1 | Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo | Aplikasi | 3 | 1,200 | 3 | 1,200 | 3 | 1,200 | 3 | 1,200 | 3 | 1,200 | 15 | 6,000 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Tersedianya Outsourching Programer pembangunan dan pengembangan aplikasi | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Tersedianya Outsourching desainer pembangunan dan pengembangan aplikasi | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 4 | Tersedianya Outsourching surveyor pembangunan dan pengembangan aplikasi | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 5 | Terpeliharanya perangkat pembangunan dan pengembangan aplikasi | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 6 | Tersedianya lisensi hak pakai Cpanel | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 7 | Tersedianya lisensi hak pakai webmail Kota Bogor | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | **Program 1.1 : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | **3** | **Persentase Keterbukaan Informasi publik** | **%** | **100** | **1,200** | **100** | **1,225** | **100** | **1,350** | **100** | **1,375** | **100** | **1,500** | **100** | **6,650** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.23 : Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi | 1 | Tersedianya Konten Publikasi Informasi | Konten | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,100 | 10 | 1,100 | 10 | 1,200 | 53 | 5,400 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | | 2 | Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kreatif dan Inovatif | kelompok | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | | |
| | | | 3 | Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat | Lomba | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | | |
| | | | 4 | Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi | Orang | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | 11 | | | |
| | | | 5 | Tersebarnya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah | Medsos (Internal & External) | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| | | | 6 | Tersedianya Peralatan studio Video dan Film | paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 7 | Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk | Buah | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 740 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | | |
| | | Kegiatan 1.1.24 : Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia | 1 | Tersedianya Booklet Smartcity | Paket | 1 | 200 | 1 | 225 | 1 | 250 | 1 | 275 | 1 | 300 | 5 | 1,250 | Diskominfostandi Kota Bogor | Kota Bogor |
| | | | 2 | Terpeliharanya hologram | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | 3 | Tersedianya Brosur/Leaflet | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | | |
| | | | 4 | Tersedianya APK Mobily Smartcity | Paket | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | **Program 1.2 : Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah** | **1** | **Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)** | **Level** | **Level 1** | **1,900** | **Level 1** | **1,100** | **Level 2** | **1,200** | **Level 3** | **1,300** | **Level 3** | **1,300** | **Level 3** | **6,800** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.2.1 : Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian | 1 | Tersedianya Dokumen Sistem Keamanan Informasi | Paket | 1 | 1,600 | 1 | 800 | 1 | 900 | 1 | 1,000 | 1 | 1,000 | 5 | 5,300 | Diskominfostandi Kota Bogor | Kota Bogor |
| | | | 2 | Tersedianya Sistem Anti Virus | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | | |
| | | | 3 | Tersosialisasinya Keamanan Informasi | Orang | 164 | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | | 809 | | | |
| | | | 4 | Tersedianya Firewall | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 5 | Tersedianya Software berlisensi | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | | |
| | | Kegiatan 1.2.2 : Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah | 1 | Penyelenggaraan Audit Sistem Elektronik per tahun dengan pertimbangan bahwa setiap tahunnya akan ada penambahan dan pengembangan aplikasi | Paket | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 5 | 1,500 | Diskominfostandi Kota Bogor | Kota Bogor |
| | | | | Peningkatan layanan pengaduan masyarakat | % | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | | |
| | | **Program 1.1 : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | **1** | **Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP** | % | **85** | **1,560** | **90** | **1,560** | **95** | **2,065** | **95** | **2,065** | **100** | **2,070** | **100** | **9,320** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.1.25 : Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat | 1 | Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat | Paket | 1 | 1,560 | 1 | 1,560 | 1 | 2,065 | 1 | 2,065 | 1 | 2,070 | 1 | 9,320 | Diskominfostandi Kota Bogor | Kota Bogor |
| | | | 2 | Tersedianya Operator pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat | Org | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | | | |
| | | | 3 | Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengaduan Masyarakat | Paket | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 4 | Tersedianya server Aplikasi layanan Pengaduan masyarakat | Unit | 1 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | | |
| | | | 5 | Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi layanan Pengaduan Masyarakat | paket | 1 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | | |
| | | **Program 1.3 : Pengembangan Data dan Informasi** | **1** | **Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik** | **%** | **55** | **641** | **60** | **1,650** | **65** | **1,815** | **70** | **1,996** | **75** | **2,196** | **75** | **8,298** | **Diskominfo Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 1.3.1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID | 1 | Kuisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu | Lembaga | 40 | 97 | 40 | 550 | 40 | 605 | 40 | 665 | 40 | 732 | 40 | 2,649 | Diskominfo Kota Bogor | Kota Bogor |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | | |
| | | | 2 | Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Dokumen | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Workshop KIP | Kali | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | Kegiatan 1.3.2 : Penguatan Hubungan Kelembagaan Masyarakat | 1 | Kegiatan Bakohumas TK. Kota Bogor | Kali | 1 | 544 | 1 | 1,100 | 1 | 1,210 | 1 | 1,331 | 1 | 1,464 | 1 | 5,649 | Diskominfo Kota Bogor | Kota Bogor |
| | | | 2 | Forum Perhumas | Kali | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | | 3 | Keikutsertaan dalam Bakohumas TK. Provinsi dan TK. Nasional | Kali | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | **Sasaran 2 :** Tersedianya data statistik sektoral | | | Jumlah penyajian statistik sektoral | Buku | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | | **Program 2.1 : Penyelenggaraan Statistik Sektoral** | **1** | **Persentase ketersediaan data statistik sektoral** | **%** | **70** | **3,800** | **73** | **4,200** | **76** | **4,600** | **79** | **5,000** | **82** | **5,400** | **82** | **23,000** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 2.1.1 : Pengelolaaan statistik sektoral | 1 | Tersedianya indikator statistik sektoral | Indikator | 7 | 1,900 | 8 | 2,200 | 9 | 2,400 | 10 | 2,700 | 11 | 2,940 | 11 | 12,140 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 2.1.2 : Satu Data Statistik sektoral | 1 | Terselenggaranya satu Data Statistik Sektoral | data statistik sektoral | 1 | 1,400 | 1 | 1,500 | 1 | 1,700 | 1 | 1,800 | 1 | 1,960 | 1 | 8,360 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 2.1.3 : Penyajian Statistik Sektoral | 1 | Tersedianya hasil produk Data Statistik Sektoral yang dipublikasikan | media | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 2,500 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja/Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | Target | Rp. (dlm juta) | | |
| **Tujuan 2 :** Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional | | | | **Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas** | Nilai | B | | | | | | | | | | A | | | |
| | **Sasaran 3 :** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas | | 1 | Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas | Nilai | B | | BB | | BB | | BB | | A | | A | | | |
| | | | 2 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti | % | 90 | | 90 | | 95 | | 95 | | 100 | | 100 | | | |
| | | **Program 3.1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **1** | **Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah** | **%** | **100** | **1,280** | **100** | **2,342** | **100** | **2,410** | **100** | **2,479** | **100** | **2,551** | **100** | **11,062** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 3.1.1 : Pengelolaan Rumah Tangga OPD | 1 | Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah | % | 100 | 1,280 | 100 | 2,342 | 100 | 2,410 | 100 | 2,479 | 100 | 2,551 | 100 | 11,062 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | **Program 4.1 : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur** | **2** | **Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah** | **%** | **80** | **1,343** | **85** | **7,414** | **90** | **4,503** | **95** | **4,582** | **100** | **4,668** | **100** | **22,510** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 4.1.1 : Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor | 1 | Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor | % | 80 | 325 | 85 | 5,350 | 90 | 2,380 | 95 | 2,408 | 100 | 2,440 | 100 | 12,903 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 4.1.2 : Pengadaan Inventaris Kantor | 1 | Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor | % | 80 | 1,018 | 85 | 2,064 | 90 | 2,123 | 95 | 2,174 | 100 | 2,228 | 100 | 9,607 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | **Program 5.1 : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan** | **3** | **Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah** | **Point** | **B** | **30** | **BB** | **30** | **BB** | **30** | **BB** | **30** | **A** | **30** | **A** | **150** | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |
| | | Kegiatan 5.1.1 : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD | 1 | Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun | Dokumen | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 150 | **Diskominfostandi Kota Bogor** | **Kota Bogor** |